

BAB IV
KONTEKS INTERNASIONAL: DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI
TIONGKOK TERHADAP REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM ISU
ENERGI NUKLIR

Bab IV membahas mengenai respon Republik Rakyat Tiongkok terhadap isu nuklir dan dasar-dasar kepentingan politik RRT di Timur Tengah. Selain itu, bab ini juga membahas konsumsi energi Tiongkok.

Akibat dari stabilitas Tiongkok yang baik meliputi: politik dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang mengesankan, keadaan militer yang stabil menyebabkan konteks internasional atau politik luar negeri Tiongkok terhadap Iran, mempengaruhi kerjasama ekonomi dan kemajuan Tiongkok termasuk didalamnya isu energi nuklir. Seperti telah dijelaskan di muka sistem politik domestik RRT, dalam proses pengambilan politik luar negeri mengikuti salah satu dari 3 (tiga) model yaitu: ruling elite model.

Dalam melaksanakan konteks internasional guna diimplementasikan dalam konteks pengambilan keputusan politik luar negeri, maka partai Kuo Mintang melalui kongres, menjadi aktor (orang yang melakukan interaksi politik luar negeri) dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hanya partai komunis Kuo Mintang konservatif yang akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan yang pada akhirnya banyak dilakukan pada bidang politik dalam negeri, ekonomi dan militer serta konteks internasional. Seperti konteks domestik ini.

A. Respon RRT Terhadap Isu Nuklir Iran

Nuklir Iran menjadi isu global dan perbincangan hangat diawal dekade tahun 2000-an . Proses pengembangan teknologi yang mulanya mendapat restu dari masyarakat internasional mulai diusik dengan isu yang dapat mengancam peradaban dan nilai-nilai perdamaian dunia. Walaupun pihak Teheran sendiri sudah berkali-kali mengatakan bahwa proyek pengembangan nuklirnya adalah murni bertujuan untuk damai, memasok energi bagi keperluan industri dan listrik dalam negeri.⁷¹

Masyarakat dunia dalam hal ini AS dan negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat berkali-kali mendesak Iran untuk segera menghentikan kegiatan pengayaan Uranium untuk keperluan teknologi nuklirnya. Meski mendapat kecaman dari Amerika dan para sekutunya namun keinginan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya tidak bisa dibendung. Kecaman Amerika dan kroni-kroninya atas nuklir yang dikembangkan Iran tidak membuat Iran gentar sambil meyakinkan dunia bahwa nuklir Iran dimaksudkan untuk tujuan damai dan kemajuan bangsa Iran, bukan untuk dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal seperti yang digembar-gemborkan Amerika kepada masyarakat dunia. Menurut Ahmadinejad, nuklir adalah teknologi prestisius yang dapat membawa bangsa Iran melesat menjadi bangsa yang maju, karena apabila Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir nya tersebut berkembang, maka anggaran subsidi listrik nasional dapat dikurangi secara drastis yang berarti dalam jangka panjang Iran akan menjadi Negara yang mandiri di semua bidang. Dan dalam

⁷¹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-teknologi-nuklir-iran-di-dewan.html>

jangka pendeknya, devisa Negara yang sangat besar akan masuk ke dalam kas Negara Iran seiring meningkatnya harga gas dan minyak dunia, dan itu berarti kemakmuran akan segera datang menghampiri bangsa Iran.

Sikap ngotot Iran ini menjadikan isu nuklir Iran mengelinding seperti bola salju yang semakin besar hingga akhirnya isu nuklir Iran menjadi bahasan hangat di forum-forum internasional. Amerika secara tanggap membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB (*security council of united nations*) sebagai isu keamanan dunia atau dunia sedang dalam ancaman.⁷²

Pada Februari 2003, Iran mengumumkan program pengayaan uranium yang berpusat di Natanz. Iran mengklaim bahwa program pengayaan uranium tersebut akan digunakan untuk teknologi dan dengan tujuan damai. Iran justru mengundang badan PBB yang bertugas memonitoring aktivitas nuklir negara-negara di dunia, IAEA (*International Atomic Energy Agency*), untuk berkunjung ke Iran dan memeriksa aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat adalah pihak yang melihat adanya indikasi bahwa program pengayaan uranium Iran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat melaporkan kasus Iran ini kepada Dewan Keamanan PBB.

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis, dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran

⁷² <http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-teknologi-nuklir-iran-di-dewan.html>

tidak memberikan laporan tentang aktivitas nuklirnya secara jelas. Masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sejumlah resolusi sanksi terhadap Iran, menyusul laporan Badan Energi Atom Dewan Internasional Gubernur mengenai ketidakpatuhan Iran dengan perjanjian perlindungan dan temuan Dewan bahwa kegiatan nuklir Iran menimbulkan pertanyaan dalam kompetensi Dewan Keamanan. Sanksi pertama kali diberlakukan ketika Iran menolak permintaan Dewan Keamanan bahwa Iran menanggukkan semua kegiatan pengayaan terkait dan pemrosesan kembali. Sanksi akan dicabut ketika Iran memenuhi tuntutan dan memenuhi persyaratan Dewan Gubernur IAEA. Hingga kini, sanksi Iran adalah sanksi terberat yang telah dikenakan masyarakat dunia pada negara manapun.⁷³

Pertama, Resolusi 1696 (31 Juli 2006). Resolusi ini dikeluarkan karena IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran dan Iran tidak mau melaksanakan saran-saran dari IAEA serta tetap melanjutkan pengayaan uranium. Resolusi ini dibahas ketika pertemuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok) ditambah Jerman dan Uni Eropa di Paris pada tanggal 12 Juli 2006. Isi dari resolusi tersebut bahwa Iran harus menuruti langkah yang disarankan oleh IAEA, meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas, dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran. Batas waktunya ditetapkan hingga tanggal 31 Agustus 2006.

⁷³ https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iran

Iran ternyata masih tidak mau bekerja sama dengan IAEA. Semua yang terkait dengan proses pengayaan tidak dilaporkan. Iran juga tidak melaksanakan beberapa saran yang diberikan oleh IAEA. Akhirnya, keluarlah resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (23 Desember 2006). Resolusi tersebut masih berisi tentang himbauan kepada Iran untuk melaporkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengayaan kepada IAEA, himbauan kepada semua negara untuk tidak menyuplai, menjual, atau mentransfer apapun (seperti material, bantuan dana, teknologi) yang akan berkontribusi terhadap pengembangan nuklir Iran, walaupun ada barang-barang yang akan diperdagangkan maka itu harus atas sepengetahuan IAEA. Batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari.⁷⁴

Resolusi ketiga dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Iran gagal memenuhi himbauan-himbau yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya.⁷⁵ Resolusi 1747 (24 Maret 2007) menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain larangan melakukan perdagangan senjata, pembekuan aset 28 orang dan organisasi yang berkaitan dengan program nuklir, permintaan terhadap negara-negara agar memberlakukan larangan bepergian (*travel ban*) terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi. Resolusi tersebut juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam bantuan keuangan atau pinjaman kepada Iran.⁷⁶

⁷⁴ *Resolution 1737 (2006)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1737 (2006)

⁷⁵ *Resolution 1747 (2007)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1747 (2007)

⁷⁶ Muhammad Ridhwan's Site. [Diakses 31 Maret 2009]. <<http://laisalax.multiply.com/journal/item/5>>

Resolusi keempat dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 Maret 2008 yaitu Resolusi 1803. Setelah beberapa kali laporan IAEA selama tahun 2007, ternyata Iran tidak menunjukkan perkembangan untuk bekerja sama dengan IAEA.

Pada 9 Juni 2010, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengeluarkan resolusi baru yang memperingatkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Resolusi bernomor 1929 (2010) tersebut menambah sanksi baru bagi Iran, karena dianggap tidak mau mematuhi resolusi sebelumnya. Ini resolusi yang kelima mengenai nuklir Iran sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, ada dua resolusi tentang nuklir Iran, yaitu: Resolusi No. 1696 (2006) dan No. 1737 (2006). Tahun 2007, ada Resolusi No. 1747 (2007). Kemudian tahun 2008, keluar Resolusi 1803 (2008).

Dari kelima resolusi tersebut, Resolusi No. 1929 (2010) adalah yang terendah dukungannya dibandingkan resolusi lainnya. Tiga resolusi pertama (1696, 1737, 1747) didukung penuh oleh 15 anggota DK PBB. Tapi Resolusi 1803 (2008) hanya didukung oleh 14 negara. Satu negara lain, yakni: Indonesia yang waktu itu menjadi anggota tidak tetap DK PBB menyatakan abstain pada saat pemungutan suara berlangsung. Sementara itu, Resolusi 1929 (2010) hanya didukung oleh 12 negara. Dua negara, yakni: Brasil dan Turki menolak, sedangkan Lebanon menyatakan abstain. Mengapa dukungan resolusi mengenai nuklir Iran semakin menurun, padahal negara-negara Barat dengan gencar mendesak adanya sanksi yang tegas terhadap Iran? Isi dari resolusi ini kurang lebih sama dengan resolusi sebelumnya. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan

PBB menegaskan kembali tentang isi dari tiga resolusi sebelumnya.⁷⁷ Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara: 5 negara anggota tetap (Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan 10 negara merupakan anggota tidak tetap.

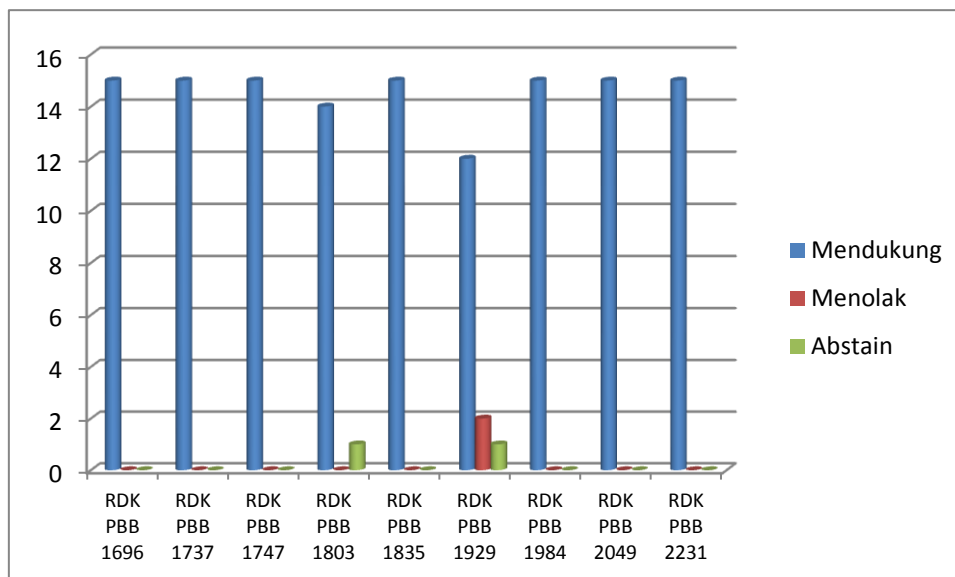
Tabel 4.1

Dukungan Dewan Keamanan untuk Sanksi PBB terhadap Iran

Resolusi	Mendukung	Menolak	Abstain
RDK PBB 1696	15	0	0
RDK PBB 1737	15	0	0
RDK PBB 1747	15	0	0
RDK PBB 1803	14	0	1 (Indonesia)
RDK PBB 1835	15	0	0
RDK PBB 1929	12	2 (Brasil - Turki)	1 (Lebanon)
RDK PBB 1984	15	0	0
RDK PBB 2049	15	0	0
RDK PBB 2231	15	0	0

⁷⁷ *Resolution 1803 (2008)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1803 (2008).

Gambar 4.1
Grafik Dukungan untuk Sanksi PBB terhadap Iran Tahun 2006-2015



Tabel 4.2

Sanksi PBB terhadap Iran⁷⁸

Resolusi	Tahun	Keterangan	Sikap RRT
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696	31 Juli 2006	Iran dituntut untuk menanggukkan semua kegiatan pengayaan uranium dan pemrosesan kembali serta ancaman akan mendapatkan sanksi.	Mendukung resolusi, menurut RRT: penyelesaian kasus nuklir Iran dapat ditempuh melalui diplomasi. ⁷⁹
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737	23 Desember 2006	Dibuat mandat bagi Iran untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium dan pemrosesan kembali serta menghimbau untuk bekerja sama dengan IAEA, menjatuhkan sanksi: melarang pasokan bahan dan teknologi yang terkait nuklir,	Mendukung resolusi, menurut RRT: tujuan dari resolusi Dewan Keamanan yang baru tidak untuk menghukum Iran tapi untuk mendesak Iran untuk kembali ke perundingan dan

⁷⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iran

⁷⁹ China Daily (2006) *Russia, China: Don't Use Force in Iran*. China Daily, 17 Mei 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www2.chinadaily.com.cn/world/2006-05/17/content_592707.htm>

Resolusi	Tahun	Keterangan	Sikap RRT
		dan membekukan aset individu-individu penting dan perusahaan yang terkait dengan program nuklir.	mengaktifkan upaya diplomatik. ⁸⁰
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747	24 Maret 2007	Melakukan embargo senjata dan memperluas pembekuan aset Iran.	Mendukung resolusi, menurut RRT: tujuan dari resolusi Dewan Keamanan yang baru tidak untuk menghukum Iran tapi untuk mendesak Iran untuk kembali ke perundingan dan mengaktifkan upaya diplomatik. ⁸¹
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803	3 Maret 2008	Diperpanjang pembekuan aset dan menghimbau negara-negara untuk memantau kegiatan bank-bank Iran, memeriksa kapal dan pesawat Iran, dan memantau pergerakan individu yang terlibat dengan program nuklir yang masuk ke wilayah mereka.	Mendukung resolusi, menurut RRT: Resolusi ini tidak ditujukan untuk menghukum Iran, tetapi mempromosikan kembalinya negosiasi dan dengan demikian untuk mengaktifkan babak baru upaya diplomatik. ⁸²
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1835	2008	Menguatkan kembali resolusi sebelumnya terhadap Iran sejak Juli 2006 namun tidak memuat sanksi baru.	Mendukung resolusi, menurut RRT: Resolusi ini tidak ditujukan untuk menghukum Iran, tetapi mempromosikan kembalinya negosiasi dan dengan demikian untuk mengaktifkan babak baru upaya diplomatik. ⁸³

⁸⁰ <http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t306115.htm>

⁸¹ <http://www.un.org/press/en/2007/sc8980.doc.htm>

⁸² http://www.china.org.cn/international/foreign_ministry/2008-03/05/content_11613490.htm

⁸³ *Ibid.*

Resolusi	Tahun	Keterangan	Sikap RRT
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1929	9 Juni 2010	Melarang Iran untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik, mengencangkan embargo senjata, larangan perjalanan individu yang terlibat dengan program nuklir, membekukan dana dan aset dari Pengawal Revolusi Iran dan Republik Islam Iran yang melalui pengiriman, merekomendasikan negara untuk memeriksa kargo Iran, melarang servis kapal Iran yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang, mencegah penyediaan jasa keuangan yang digunakan untuk kegiatan nuklir yang sensitif, pengawan melekat pada individu Iran dan entitas ketika berhadapan dengan mereka, melarang pembukaan bank Iran di wilayah mereka dan mencegah bank-bank Iran berhubungan dengan bank-bank mereka jika bank tersebut mungkin berkontribusi terhadap program nuklir, dan mencegah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah mereka dari pembukaan kantor dan rekening di Iran.	Mendukung resolusi, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1984	9 Juni 2011	Resolusi ini memperpanjang mandat panel ahli yang mendukung Komite Sanksi Iran selama satu tahun.	Mendukung resolusi, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2049	7 Juni 2012	Pembaruan mandat Komite Panel Ahli Sanksi Iran untuk 13 bulan.	Mendukung resolusi, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang.

Resolusi	Tahun	Keterangan	Sikap RRT
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231	20 Juli 2015	Menetapkan jadwal untuk menangguhkan dan akhirnya mencabut sanksi PBB, dengan ketentuan untuk menerapkan kembali sanksi PBB dalam kasus non-kinerja dengan Iran, sesuai dengan Rencana Bersama Komprehensif Aksi.	Mendukung resolusi, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang.

Sejak awal, Republik Rakyat Tiongkok cukup konsisten menunjukkan ketidaksepakatan terhadap penambahan sanksi yang lebih keras kepada Iran supaya Iran menghentikan aktivitas nuklirnya. Republik Rakyat Tiongkok menganggap bahwa masih ada peluang untuk menyelesaikan kasus Iran tersebut melalui perundingan. Demikian yang dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Qin Gang, pada jumpa pers menjelang pertemuan para menteri luar negeri dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman pada 30 Maret 2006. Qin Gang juga mengatakan bahwa sikap Republik Rakyat Tiongkok tentang penyelesaian masalah tersebut tidak akan berubah⁸⁴.

Pada tanggal 16 Mei 2006, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Li Zhaoxing di Beijing untuk membicarakan tentang program nuklir Iran. Kedua pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB berusaha membendung upaya-upaya Barat untuk meloloskan resolusi yang mengharuskan Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya atau menghadapi sanksi-sanksi (CMM, 2006). Lebih lanjut, Rusia

⁸⁴ <http://www.merdeka.com/politik/internasional/china-sambut-pembicaraan-multilateral-untuk-bahas-program-nuklir-iran-f1vwrh4.html>

dan Republik Rakyat Tiongkok tidak akan ikut memilih atau mendukung untuk penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah nuklir Iran. Lavrov ketika diwawancarai mengatakan bahwa negosiasi adalah kunci untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran. Lavrov juga mengatakan bahwa setelah pertemuannya dengan Menlu Republik Rakyat Tiongkok, bisa disimpulkan bahwa Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki posisi yang sama dalam menyikapi program nuklir Iran, di mana keduanya menginginkan diplomasi⁸⁵.

Penolakan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok terhadap pemberian sanksi PBB kepada Iran menjadi agenda utama pembahasan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Hu Jintao dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan Presiden Hu selama tiga hari pada akhir Maret 2007 di Rusia. Mereka ingin menemukan solusi yang dapat diterima bersama atas masalah nuklir Iran. Kedua negara akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus program nuklir Iran secara damai melalui negosiasi⁸⁶.

Masih pada bulan Maret 2007, ketika Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB semakin menghangat, diadakan pertemuan besar di Shanghai yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah bekas Soviet (Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan), serta mendatangkan pengamat dari Iran, India, Pakistan, dan Afghanistan. Pertemuan ini dilakukan

⁸⁵ China Daily (2006) *Russia, China: Don't Use Force in Iran*. China Daily, 17 Mei 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www.chinadaily.com.cn/world/2006-05/17/content_592707.htm>;

⁸⁶ BBC (2007) *China-Rusia Dukung Nuklir Iran*. 17 November 2007. [Diakses 31 Maret 2009] <<http://international.okezone.com/read/2007/11/17/18/61645/18/china-rusia-dukung-nuklir-iran>>;

untuk menyerukan perlunya perundingan-perundingan dalam penyelesaian masalah Iran.⁸⁷

Penolakan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok terus berlanjut. Pada tanggal 19 November 2007 diadakan rapat Dewan Keamanan PBB di Brussel, Belgia, dan ternyata Republik Rakyat Tiongkok menolak menghadiri rapat tersebut. Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa sikap Republik Rakyat Tiongkok tersebut tidak lepas dari penolakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap sanksi tahap keempat (Resolusi 1803) yang digagas oleh Amerika Serikat dan beberapa anggota Uni Eropa. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menolak sanksi tegas untuk Iran karena dianggap dapat semakin mempersulit upaya komunitas internasional dalam penyelesaian konflik nuklir Iran. Rusia justru mengirim bahan baku nuklir ke reaktor nuklir Iran, sesuatu yang bertentangan dengan seruan Amerika Serikat (tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB) agar seluruh negara di dunia menghentikan setiap bentuk kerjasama nuklir dengan Iran.⁸⁸

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, para diplomat penting enam negara (5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman) berencana mengadakan pertemuan untuk membahas sanksi-sanksi baru terhadap Iran supaya Iran menghentikan pengayaan uraniumnya. Namun, Rusia menganggap bahwa pertemuan yang dijadwalkan dilakukan pada tanggal 25 September 2008 tersebut tidak penting. Dua hari sebelum pertemuan, Rusia memaksa negara-negara dunia

⁸⁷ Bandaro, Erizeli. (2008) *Iran dan AS*. 1 Maret 2008. *Neocolonialism*. [Diakses 31 Maret 2009]. <<http://culas.blogspot.com/2008/03/iran-dan-as.html>>

⁸⁸ www.okezone.com

untuk membatalkan rencana pertemuan tersebut. Kementerian luar negeri Rusia bahkan mengatakan bahwa Rusia melihat tidak ada hal yang mendukung yang membuat mereka membicarakan program nuklir Iran di tengah jadwal Majelis Umum PBB yang begitu padat. Akibatnya, pertemuan tersebut pun dibatalkan.⁸⁹

Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok secara terus menerus memberikan respon penolakan terhadap pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Iran. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai cara seperti pernyataan sikap, pembatalan pertemuan dengan negara lain, pertemuan antara menteri dan presiden kedua negara, bahkan pemberian bantuan kepada Iran. Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok sama-sama menganggap bahwa pemberian sanksi justru akan memperburuk keadaan dan jalan yang paling solutif adalah jalan damai melalui perundingan. Berbagai tindakan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka menolak sanksi lebih jauh yang akan diberikan kepada Iran tersebut, dianggap Eden (2008) telah berhasil mencegah Amerika Serikat untuk men-*deter* Iran dalam komunitas internasional.⁹⁰

Resolusi yang berisi sanksi terhadap Iran karena menolak menghentikan pengayaan uranium tersebut didukung oleh mayoritas negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik anggota tetap maupun tidak tetap. Berbeda dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang lain, yang menginginkan tekanan dan sanksi yang lebih tegas kepada Iran, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok justru

⁸⁹ Berita Sore (2008) Rusia Gagalkan Pertemuan Enam Negara Mengenai Nuklir Iran. Berita Sore, 24 September 2008. [Diakses 31 Maret 2009] <<http://beritasore.com/2008/09/24/rusia-gagalkan-pertemuan-enam-negara-mengenai-nuklir-iran/>>

⁹⁰ <https://kanshaforlife.wordpress.com/2012/09/18/respon-rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb-atas-nuklir-iran-2006-2008-sebuah-studi-komparasi/>

menegaskan bahwa konflik tersebut harus dicapai penyelesaiannya secara damai.⁹¹

Sikap Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok tersebut antara lain dilandasi pertimbangan. Pertama, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah kawan lama dan hubungan kedua negara tersebut begitu harmonis terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok berani mengambil sikap yang bertentangan dengan mayoritas negara-negara Dewan Keamanan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat yang begitu sangat berambisi untuk melancarkan tindakan keras kepada Iran.⁹² Ketiga, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah *new emerging power* dalam konstelasi ekonomi politik global. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjawab satu pertanyaan, mengapa Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok memberikan respon yang berbeda dengan mayoritas negara-negara dunia yang dimotori Amerika Serikat tentang penambahan sanksi atas nuklir Iran?

Dalam bidang politik, Republik Rakyat Tiongkok melihat Iran sebagai kekuatan regional baru di kawasan Timur Tengah, dimana upaya pengembangan nuklirnya telah menjadi ancaman bagi negara di sekitarnya dan AS. Republik Rakyat Tiongkok memandang Iran sebagai negara yang independen dari pengaruh Barat, sehingga Iran menjadi sekutu yang potensial bagi Republik Rakyat Tiongkok dalam melawan hegemoni AS. Republik Rakyat Tiongkok juga ingin

⁹¹ Deutsche Welle (2008) *Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok Minta Iran Perlunak Sikap*. Deutsche Welle, 27 Maret 2007. [Diakses 31 Maret 2009]. <<http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,,2939127,00.html>>

⁹² Center for Moderate Muslim Indonesia (2006) *AS Akan Bentuk Koalisi Anti-Iran*. [Diakses 31 Maret 2009] <[http://www.cmin.or.id/cmm-ind more.php?id=A1320 0 3 0 M](http://www.cmin.or.id/cmm-ind%20more.php?id=A1320%203%20M)>

memperbaiki citranya di kawasan Asia Tengah, dengan tetap memberikan bantuan terhadap Iran melalui kerjasama bilateral di antara keduanya.

Bagi Iran, Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara eksportir besar bagi Iran dalam bidang mesin dan peralatan, tekstil, produk kimia dan barang-barang konsumsi. Selain itu banyak perusahaan minyak Republik Rakyat Tiongkok yang menanamkan investasinya di Iran. Perusahaan-perusahaan tersebut membantu Iran dalam penyulingan minyak dan gas karena minimnya teknologi yang dimiliki Iran. Secara tidak langsung ini akan membantu meningkatkan produksi minyak dan gas Iran yang akan mendukung pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut.⁹³

Secara politik Iran menganggap Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan besar yang dapat menandingi AS, sehingga Republik Rakyat Tiongkok merupakan sekutu potensial bagi Iran dimana Iran memanfaatkan hal tersebut untuk membantunya melawan hegemoni AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran mengharapkan Republik Rakyat Tiongkok mampu melindungi kebijakan nuklirnya dari peningkatan sanksi yang diajukan AS dan sekutunya.

Hubungan internasional melibatkan tiga aspek penting yaitu aktor, interaksi dan kekuatan. Aktor adalah sang pelaku interaksi dalam menjalin hubungan internasional. Seperti yang telah diketahui terdapat dua macam aktor yaitu, aktor negara dan non-negara. Aktor negara menjalin hubungan internasional untuk melaksanakan kepentingan nasional.

⁹³ <http://eprints.upnyk.ac.id/2729/>

Kepentingan nasional menurut H. J. Morgenthau⁹⁴ sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan Joseph Frankel berpendapat lain, kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti yang dibuat oleh Morgenthau. Frankel juga mengatakan bahwa hakikat kepentingan nasional adalah sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Mengenai kepentingan nasional Frankel juga mengatakan bahwa tolak ukur kepentingan nasional sangatlah kabur.⁹⁵

Kepentingan nasional juga diakui sebagai konsep aspek penting dalam politik luar negeri. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri didasarkan aspek kepentingan nasional. Dalam keputusan dan tindakan politik luar negeri kadang terjadi perbedaan antara pernyataan tentang nilai dan prinsip yang dianut satu pihak dengan pihak lain.

Coulombis dan Wolfe⁹⁶ mencontohkan mengenai perbedaan tersebut dengan menunjukkan politik luar negeri Amerika mengenai keinginan memelihara hubungan baik dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Bertemunya kepentingan berbagai negara merupakan sumber terjadinya

⁹⁴ Hans J. Morgenthau, "Politik Antar Bangsa" dalam buku Sidik Jatmika, 2015, *Pengantar Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit Pujangga Mulia, Yogyakarta, hlm. 50-60.

⁹⁵ Frankel dalam buku Sidik Jatmika, 2015, *Pengantar Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit Pujangga Mulia, Yogyakarta, hlm. 58-62.

⁹⁶ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional; Suatu Telaah Teoritis* [Introduction to international politics: a theoretical overview], 1992, Mercedes Marbun, Trans., 2nd Edition, Bandung: Sinar Baru, p. 30

kerjasama. Akan tetapi perselisihan internasional merupakan konsekuensi dari kepentingan nasional yang berbenturan. Pada akhirnya keseimbangan kekuatan bisa dicapai dengan kebijaksanaan saling mempengaruhi antar negara.⁹⁷

Interaksi intensif Republik Rakyat Tiongkok dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Pasifik, dimulai pada akhir 1970-an ketika pemimpin negeri itu Deng Xiaoping mengadopsi kebijakan reformasi dan pintu terbuka. Kebijakan reformasi pintu terbuka yang dimaksud adalah di bidang ekonomi yang menjadi pendorong kemajuan ekonomi yang dicapai Republik Rakyat Tiongkok saat ini, di mana negeri itu membuka kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara lain sepanjang saling menguntungkan. Melalui kebijakan reformasi dan pintu terbuka, perlahan tapi pasti Republik Rakyat Tiongkok berintegrasi ke kawasan Asia Pasifik dan global.

Guna mendukung kebijakan reformasi dan pintu terbuka, Republik Rakyat Tiongkok menganut kebijakan luar negeri yang salah satunya bertujuan untuk menciptakan dunia yang harmonis.⁹⁸ Terciptanya dunia yang harmonis tersebut penting bagi kepentingan Republik Rakyat Tiongkok untuk tercapainya lingkungan internasional yang damai dan akses negeri itu terhadap bahan mentah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan luar negeri yang demikian merupakan warisan dari era Deng Xiaoping dan kini diteruskan oleh para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok sebagai bagian dari upaya Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi aktor yang diperhitungkan dalam percaturan antar bangsa.

⁹⁷ Dean A. Minix, & Hawley, Sandra M. 1998. *Global Politics*, West/Wadsworth, [Chapter 4]. hal 100-112

⁹⁸ Lihat, Henry Kissinger, *On China*, New York: The Penguin Group, 2011, hal. 490

Memperhatikan secara sekilas garis besar kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok, cukup jelas bahwa kebijakan itu dirancang bukan semata-mata dari kepentingan di bidang politik dan keamanan, tetapi pula mengacu pada kepentingan ekonomi negara itu. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok akan dapat terjaga apabila hubungan ekonomi dengan negara-negara lain berjalan lancar tanpa ancaman dan gangguan berarti. Sementara mesin penggerak ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yaitu minyak sebagian besar didatangkan dari negara-negara lain, khususnya dari wilayah Timur Tengah, sehingga sangat penting bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk menjaga pasokan minyak tersebut untuk mengalir lancar.

Kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang harmonis memiliki keterkaitan pula dengan kebijakan dalam negeri yang ingin menciptakan masyarakat yang harmonis. Untuk mencapai tujuan kebijakan dalam negeri itu, salah satunya adalah menjaga hubungan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok dengan negara-negara lain, sebab hubungan ekonomi itu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Republik Rakyat Tiongkok. Apabila hubungan ekonomi dengan negara-negara lain terganggu, akan mempengaruhi pula situasi politik dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok yang pada dasarnya rawan akan guncangan. Kemajuan ekonomi yang begitu cepat dalam waktu singkat ternyata memunculkan masalah-masalah sosial di dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok sendiri, selain masih adanya sejumlah wilayah di negeri itu yang bergolak secara politik.

Oleh karena itu, terdapat benang merah antara kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok. Bagi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, kemampuan menjaga harmoni baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan berkaitan langsung dengan kelangsungan pemerintahan Partai Komunis. Terlebih lagi dewasa ini tuntutan dari beberapa kalangan di dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap kebebasan berpolitik kian menggema, yang mana tuntutan itu bertentangan dengan garis kebijakan partai yang berkuasa sejak 1949.

Dalam konteks hubungan antar bangsa, Republik Rakyat Tiongkok kini berupaya meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Masuknya negeri itu dalam *ASEAN Regional Forum (ARF)* pada 1993 menandai integrasi negeri itu ke dalam sistem multilateral kawasan. Sebelum krisis ekonomi Asia 1997, partisipasi Republik Rakyat Tiongkok dalam sistem multilateral kawasan bersifat pasif dan tentatif. Hal itu didasari kekhawatiran Republik Rakyat Tiongkok bahwa partisipasi dalam institusi multilateral akan mejadikannya target atas sejumlah isu, seperti hak asasi manusia.⁹⁹

Partisipasi aktif negeri itu baru dimulai ketika krisis ekonomi Asia 1997 melanda, di mana pada Kongres Kelimabelas Partai Komunis China pada September 1997 Presiden Jiang Zemin menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok harus mengambil bagian aktif dalam diplomasi multilateral. Seiring dengan hal tersebut, peran dan pengaruh Republik Rakyat Tiongkok terus meningkat di kawasan Asia Pasifik, ditandai dengan diperhitungkannya sikap

⁹⁹ Zang Xiaoming, "The Rise of China and Community Building in East Asia", dalam *Asia Perspective*, Vol. 30, No. 3, 2006, hal. 132.

Republik Rakyat Tiongkok dalam berbagai isu keamanan kawasan. Hal demikian tidak lepas dari rasa percaya diri Republik Rakyat Tiongkok yang meningkat dalam perannya di dunia internasional, sehingga negara itu kian sadar akan peran dan tanggungjawabnya. Terlebih lagi setelah Republik Rakyat Tiongkok tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) pada 2001 yang memberikan peluang besar bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk berperan besar dalam pengaturan perdagangan dunia.¹⁰⁰

Tiongkok yang terletak pada posisi sentra Asia-Pasifik, tidak harus hanya melihat melampaui batas wilayah pesisir, pesaing tradisional dan mitra, juga harus memiliki perencanaan strategi ‘Masuk ke arah Barat’. Pengembangan wilayah barat (Tiongkok) membutuhkan pilar strategis baru Pusat ekonomi dan politik Tiongkok kuno gravitasinya selalu ada di pedalaman (daratan tengah), hampir tidak ada sejarah bangsa Tiongkok yang berupaya memperluas batas-batas teritorinya keluar negeri. Jalur Sutra yang mengarah ke barat Eurasia, Timur dan Barat adalah jembatan komunikasi dan kegiatan komersil yang penting.

Di zaman modern, bagaimanapun kekuatan Barat dan Jepang telah mendobrak pintu ke Tiongkok secara militer dan ekonomi, terutama melalui laut, karena industri modern terkonsentrasi di daerah pesisir dan kota-kota besar. Awal reformasi dan politik keterbukaan, AS, Eropa, Jepang dan “4 Macan” Asia Timur adalah target utama dari pertukaran ekonomi luar negeri Tiongkok, di daerah tenggara Tiongkok telah didirikan Zona Ekonomi Khusus di sepanjang pantai dan posisinya menjadi lebih kuat dan dominan. Sementara itu, tingkat pembangunan

¹⁰⁰ US Department of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011*, hal. 17.

ekonomi dan sosial di wilayah barat biasanya selalu tertinggal dan hubungan interaksi dengan luar juga terlambat dan di bawah normal.

Sejak tahun 2000 rencana pembangun daerah ‘barat dan tengah’ mulai berubah secara signifikan. Membangun dan meningkatkan pilar geostrategis dari keseluruhan strategi pengembangan wilayah barat, berikut ini ada berapa lapisan makna. Pertama, perencanaan dan kerjasama dengan banyak negara secara keseluruhan untuk memastikan saluran pasokan sumber daya migas yang melimpah dari wilayah barat dan komoditas mengalir lancar. Bisa dibagi untuk jalur selatan, tengah, utara mempercepat pembangunan “jalur sutra baru”, dari bagian Timur Tiongkok, menyambung ke Euroasia tengah, bagian barat hingga pantai timur laut Atlantik, negara-negara sepanjang pantai Mediterania.

Dari Tiongkok barat menyambung ke Samudra Hindia harus diselesaikan jalan raya besar. Kedua, untuk memperluas hubungan dengan negara-negara di bagian barat (merujuk ke Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, negara-negara Kaspia) menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dan memberi bantuan ekonomi, pembentukan dana pembangunan kooperasi. Tahun 2011-2012, nilai perdagangan Tiongkok dan Asia Barat meningkat lebih dari 30 kali lipat (sedang pertumbuhan perdagangan luar negeri Tiongkok pada periode yang sama naik tujuh kali), proporsi dari total perdagangan luar negeri naik 9% dari 2%; tujuh tahun terakhir, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara Arab, volume perdagangan luar negeri Tiongkok lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan rata-rata 10%, yang menunjukkan kebutuhan ekonomi Tiongkok “masuk ke arah barat” dan potensi besarnya.

Ketiga, berhubung Xinjiang, Tibet dan provinsi lainnya keharmonisannya terancam stabilitas separatisme etnis asing, ekstrimis agama, terorisme dan kekuatan musuh lainnya, kejahatan lintas batas yang serius, keamanan nasional telah menjadi perhatian besar, kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan strategis perlu mengkombinasikan internal dan eksternal, yang dapat mendukung satu sama lainnya, sesuai dengan kondisi lokal, kebijakan dan pendidikan kebijakan sosial keagamaan, dan membangun keamanan nasional yang kuat, menggalang kerukunan nasional dan menghilangkan penghalang keharmonisan. Keempat, meningkatkan sumber daya diplomatik ke negara-negara di sebelah barat, studi mendalam tentang kondisi lokal dan situasi etnis dan agama, memperkuat pertukaran sosial dan budaya, membuat keuntungan untuk ekonomi Tiongkok di wilayah tersebut menjadikan keuntungan kekuasaan politik yang sederhana dan lembut, strategi memperluas ruang untuk Tiongkok bermanuver.

Strategi untuk “merasuk ke Barat” Negara-negara di sebelah Barat adalah jantung dari Eurasia, tempat kelahiran beberapa peradaban manusia besar, kaya sumber daya alam. Namun, karena berbagai sebab yang mendasari, banyak negara dalam beberapa tahun ke depan ini akan sulit untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran, beberapa negara dalam kawasan ini mengalami pergolakan politik dan etnis yang lintas batas, agama, sektarian, di masa akan datang ini akan menyulitkan ketertiban dunia dan akan berdampak serius terhadap hubungan negara kekuatan besar, demikian juga akan berdampak dengan upaya Tiongkok untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang menguntungkan dan

mempengaruhi pengembangan politik. Maka Tiongkok tidak boleh acuh, harus mengambil sikap proaktif di dunia yang luas dan banyak perbedaan ini.¹⁰¹

B. Dasar-Dasar Kepentingan Politik RRT di Timur Tengah

Wilayah Teluk Persia adalah sumber minyak bumi terbesar di dunia dan merupakan pemasok minyak¹⁰² terpenting Republik Rakyat Tiongkok. Peningkatan kebutuhan energi membuat hubungan Beijing dengan Negara-negara Teluk menjadi semakin penting, tetapi juga penuh dengan kesulitan. Republik Rakyat Tiongkok memang masih belum merupakan mitra dagang terpenting dari *Gulf Cooperation Council* (GCC) atau Dewan kerjasama untuk Negara Arab di Teluk, tetapi negeri Asia ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang tercepat. Menurut Biro Timur Tengah Lembaga Internasional Pengkajian Strategis di Bahrain, pada tahun 2030 impor minyak ke Republik Rakyat Tiongkok dan Timur Tengah akan mencapai faktor 5 dan impor gas meningkat ke faktor 4. Pada masa itu Republik Rakyat Tiongkok akan melampaui Jepang, pada tahun 2020 volume perdagangan Republik Rakyat Tiongkok-GCC akan mencapai 350 miliar dollar. Menurut guru besar pengkajian Ilmu Arab di Universitas Beijing, Wu Bingbing, Republik Rakyat Tiongkok mendefinisikan wilayah Teluk sebagai ketetangaan yang luas. Dan pengertian ini mendongkrak posisi Timur Tengah dalam kebijakan Politik Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok.

¹⁰¹ http://www.kompasiana.com/makenyok/bagaimana-kiranya-peran-rrt-dalam-dua-dekade-yang-akan-datang-di-dunia-siapa-dan-apa-peran-intelektual-dalam-negerinya-24_54f5e9dca33311c3778b45dd

¹⁰² George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia* (alih bahasa Asgar) Bixby, University Of California at Berkeley, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 122.

Kawasan Teluk akan lebih penting lagi untuk geopolitik, ekonomi, perdagangan, energi, dan perhitungan keamanan non-tradisional Republik Rakyat Tiongkok, namun Republik Rakyat Tiongkok memilih untuk melaksanakan kebijakan pragmatis di wilayah tersebut untuk menjaga hubungan Sino-AS dan untuk menghindari perselisihan antara negara-negara Teluk. Yang paling menonjol adalah kontradiksi antara kepentingan Republik Rakyat Tiongkok di wilayah tersebut dan upayanya untuk menjaga hubungan yang mulus dengan Amerika Serikat secara keseluruhan dalam kebijakan luar negerinya.¹⁰³

Seiring dengan pertumbuhan ekonominya kebutuhan energi dalam negeripun ikut meningkat. Cadangan minyak Republik Rakyat Tiongkok dijadwalkan akan habis dalam beberapa tahun, sehingga negara secara agresif sedang mencoba untuk mengamankan pasokan minyak mentah di masa depan. Salah satu partner Republik Rakyat Tiongkok dalam bekerjasama adalah Iran.¹⁰⁴

C. Konsumsi Energi RRT

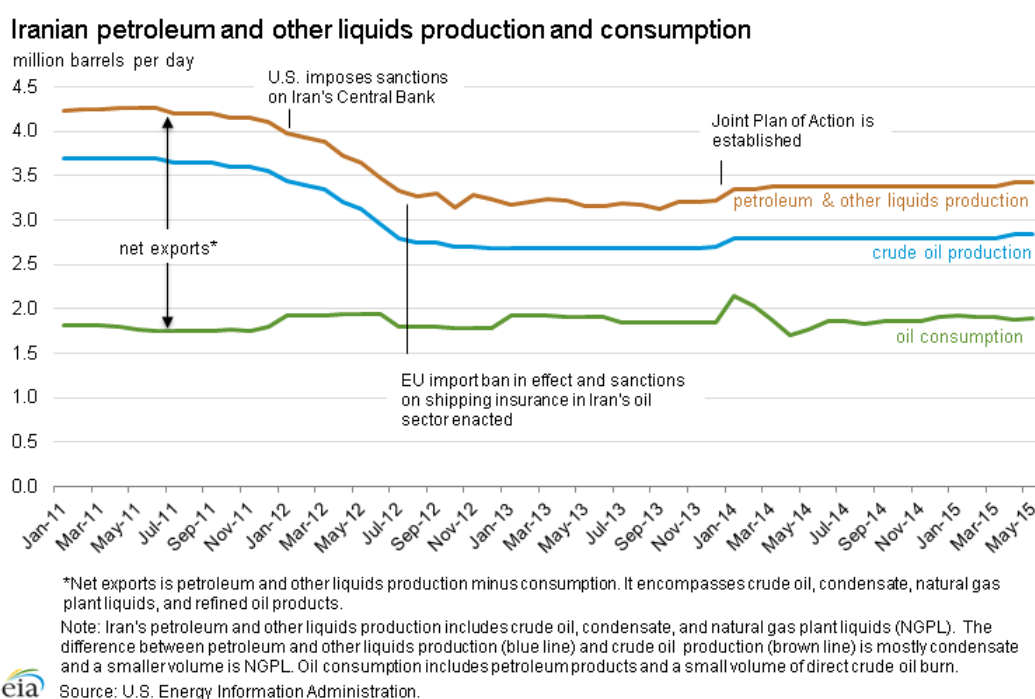
Bagi Republik Rakyat Tiongkok, selain sebagai negara tujuan ekspor industrinya, Iran juga merupakan negara pemasok minyak mentah terbesar ketiga baginya. Ketergantungan Republik Rakyat Tiongkok terhadap minyak dan gas semakin meningkat, seiring perkembangan industri di negara tersebut. Republik Rakyat Tiongkok menanamkan banyak investasi serta membantu Iran dalam mengeksplorasi ladang minyak di kawasan tersebut, untuk mendapat kemudahan dalam pasokan energinya.

¹⁰³ https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ASIA%20Program_China%20and%20the%20PG.pdf, hal. 24

¹⁰⁴ <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62549?show=full>

Iran memproduksi minyak dan cairan lain pada tahun 2014 sebanyak 3,4 juta b/hari, yang 2,8 juta b/hari adalah minyak mentah dan sisanya adalah cairan pabrik gas kondensat dan alami. Produksi minyak mentah Iran turun drastis dari hampir 3,7 juta b/hari di tahun 2011 – 2.700.000 b/hari pada tahun 2013 karena sanksi.¹⁰⁵

Gambar 4.2
Grafik Produksi & Konsumsi Minyak dan Cairan Lain Iran

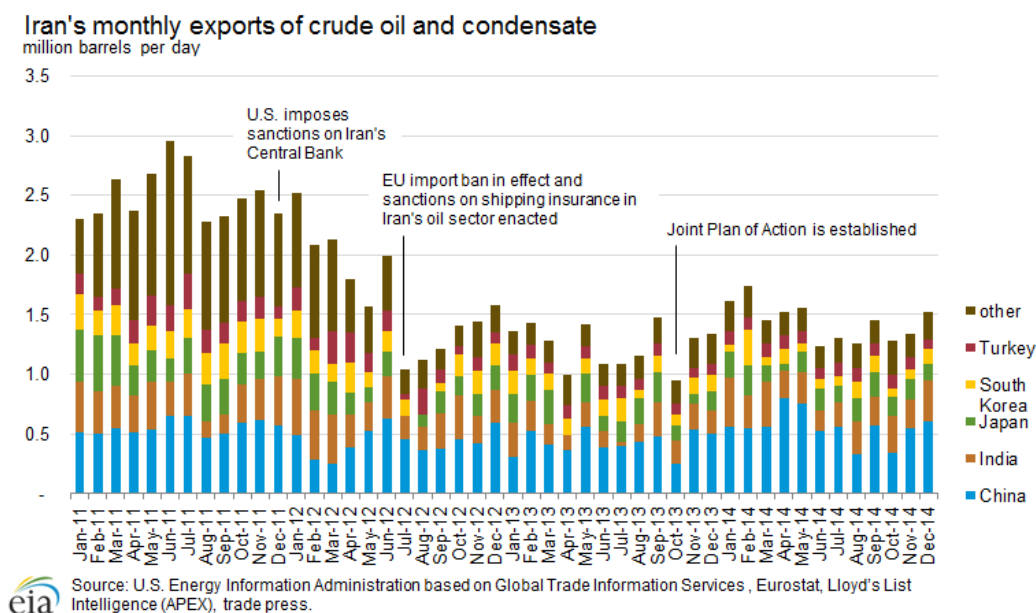


Ekspor minyak mentah dan kondensat Iran turun dari 2,6 juta b/hari pada tahun 2011 menjadi hampir 1,3 juta b/hari pada tahun 2013 dari ekspor minyak yang ditargetkan Iran sebagai akibat sanksi AS dan Uni Eropa. Ekspor Iran meningkat hampir 150.000 b/hari menjadi 1,4 juta b/hari pada tahun 2014. Para

¹⁰⁵ <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN>

pembeli terbesar dari minyak mentah Iran dan kondensat adalah Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Turki.¹⁰⁶

Gambar 4.3
Grafik Ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Iran



Penurunan ekspor minyak mentah dan kondensat Iran dikaitkan dengan sanksi baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa pada akhir 2011 dan selama musim panas 2012. Kemampuan Iran untuk menjual minyak mentah terutama telah dipengaruhi oleh larangan Uni Eropa untuk mengimpor semua minyak bumi Iran serta larangan pengenaan asuransi dan reasuransi oleh P & I Club¹⁰⁷ Eropa yang efektif 1 Juli 2012. Asuransi Eropa menanggung sebagian besar kebijakan asuransi untuk armada tanker global. Larangan asuransi terutama

¹⁰⁶ <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN>.

¹⁰⁷ Asuransi Perlindungan dan ganti rugi, lebih dikenal sebagai "P & I" asuransi, adalah bentuk asuransi maritim sering disediakan oleh P & I Club. Sedangkan perusahaan asuransi marine menyediakan "lambung kapal dan mesin" mengcover pemilik kapal, dan mengcover kargo pemilik kargo, P & I Club mengcover risiko terbuka yang asuransi tradisional enggan untuk menjamin. Khas P & I mengcover: risiko pihak ketiga pembawa untuk menyebabkan kerusakan pada kargo selama pengangkutan; risiko perang; dan risiko kerusakan lingkungan seperti tumpahan minyak dan polusi. Di Inggris, baik penjamin tradisional dan P & I Club tunduk pada Undang-Undang Asuransi Kelautan 1906.

berpengaruh pada ekspor minyak Iran, berkurangnya asuransi yang memadai menghambat penjualan minyak mentah Iran ke semua pelanggan, termasuk Asia. Ekspor Iran turun menjadi sekitar 1,0 juta barel per hari pada bulan Juli 2012 sebagai pembeli Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan India bergegas untuk menemukan alternatif asuransi. Pada akhirnya, kesulitan asuransi telah menambah tekanan sanksi yang diberlakukan oleh AS pada pelanggan minyak Iran untuk mengurangi pembelian mereka.

Iran dan negara-negara yang terus mengimpor minyak Iran telah mendapatkan alternatif P & I asuransi dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Pada kuartal terakhir 2012, ekspor Iran pulih sedikit sehingga Jepang, Korea Selatan, dan India mulai mengeluarkan jaminan berdaulat untuk kapal yang membawa minyak mentah dan kondensat Iran. Republik Rakyat Tiongkok dan India mulai menerima jaminan dari Iran Kish P & I Club¹⁰⁸ pada kapal yang mengirimkan minyak untuk kilang. Meskipun demikian, ekspor Iran telah gagal mencapai tingkat ekspor yang ada sebelum sanksi terbaru.

Pada tahun 2012, sanksi bukan satu-satunya penyebab dari penurunan ekspor. Misalnya, kepentingan komersial memberikan kontribusi terhadap penurunan impor Republik Rakyat Tiongkok, sebagai pembeli Republik Rakyat Tiongkok terlibat dalam perselisihan kontrak dengan Iran pada kuartal pertama

¹⁰⁸ Kish P & I Klub telah dibentuk oleh sekelompok Pemilik berkebangsaan Iran di Pulau Selatan dari Kish yang terletak di Teluk Persia. Sekumpulan direksi yang berasal dari berbagai bidang industri Kelautan telah mengumpulkan uang mereka ke klub yang bisa mengganti kerugian mereka baik dalam yurisdiksi pelabuhan internasional maupun lainnya. Klub memasukkan pula tanker asing dan kapal kargo ukuran raksasa dengan catatan kerugian yang sangat baik. Perusahaan pelayaran Iran yang berpartisipasi dalam pembentukan klub ada pula pembawa kargo basah dan kering.

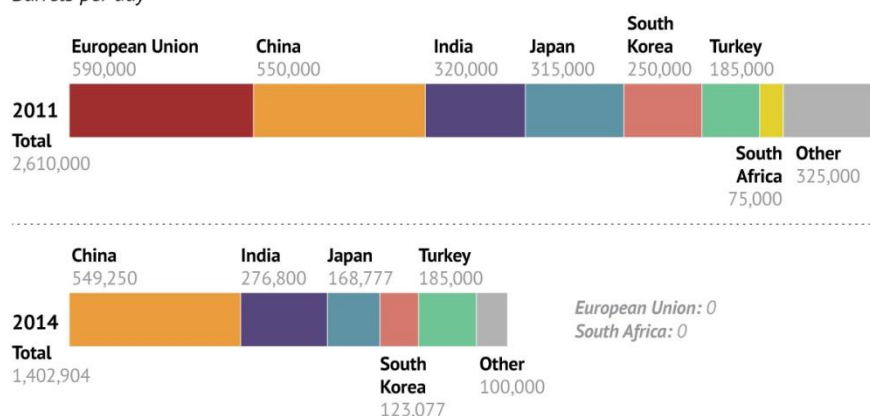
2012. Penyulingan RRT secara signifikan menurunkan pembelian minyak mentah dan kondensat Iran sebagai akibat dari perselisihan kontrak pembelian tahunan.¹⁰⁹

Perjanjian nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia secara alami akan memiliki konsekuensi untuk pasar minyak secara global seperti Iran mengekspor lebih banyak minyak lagi pada akhirnya. Sebelum Revolusi, Iran adalah negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Sebelum pelaksanaan sanksi pada tahun 2012, Iran adalah eksportir utama minyak mentah dan kondensat ke Asia, Eropa dan lain-lain - pada kenyataannya, total ekspor mencapai 2,6 juta barel per hari pada tahun 2011. Sekarang, angka itu telah menurun hampir 600.000 barel per hari ke Eropa dan 600.000 barel per hari untuk Asia. Ekspor Iran sekarang mendekati 1,4 juta barel per hari, 1 juta barel per hari merupakan minyak mentah.¹¹⁰

Gambar 4.4
Grafik Ekspor Minyak Iran: Sebelum dan Setelah Sangki

IRANIAN OIL EXPORTS: BEFORE AND AFTER SANCTIONS

Iranian Oil Exports by Destination (approximate)
Barrels per day



Sources: EIA; Reuters; IEA; country data

Copyright Stratfor 2015 www.stratfor.com

¹⁰⁹ <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN>

¹¹⁰ <https://www.stratfor.com/image/iran-oil-exports-after-sanctions>

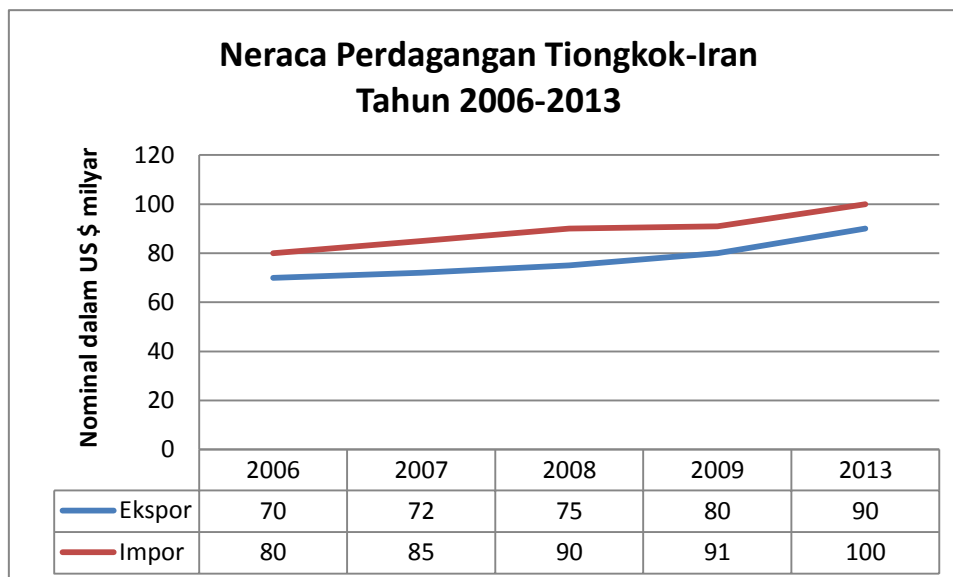
Dalam bidang politik, Republik Rakyat Tiongkok melihat Iran sebagai kekuatan regional baru di kawasan Timur Tengah, dimana upaya pengembangan nuklirnya telah menjadi ancaman bagi negara di sekitarnya dan AS. Republik Rakyat Tiongkok memandang Iran sebagai negara yang independen dari pengaruh barat, sehingga Iran menjadi sekutu yang potensial bagi Republik Rakyat Tiongkok dalam melawan hegemoni AS. Republik Rakyat Tiongkok juga ingin memperbaiki citranya di kawasan Asia Tengah, dengan tetap memberikan bantuan terhadap Iran melalui kerjasama bilateral di antara keduanya.

Bagi Iran, Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara eksportir besar bagi Iran dalam bidang mesin dan peralatan, tekstil, produk kimia dan barang-barang konsumsi. Selain itu banyak perusahaan minyak Republik Rakyat Tiongkok yang menanamkan investasinya di Iran. Perusahaan-perusahaan tersebut membantu Iran dalam penyulingan minyak dan gas karena minimnya teknologi yang dimiliki Iran. Secara tidak langsung ini akan membantu meningkatkan produksi minyak dan gas Iran yang akan mendukung pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut.¹¹¹

Neraca perdagangan tahunan Iran dengan Tiongkok menjadi US\$ 100 milyar. Ini disampaikan oleh Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Rahimi, saat pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina Wu Bangguo di Teheran tahun 2013. Iran pemasok terbesar ke-3 minyak mentah bagi Tiongkok. Minyak Iran ke Tiongkok \pm 12% dari total konsumsi minyak tahunan Tiongkok atau \pm 1 juta barel perhari.

¹¹¹ <http://eprints.upnyk.ac.id/2729/>

Gambar 4.5
Grafik Neraca Perdagangan Tiongkok-Iran (US \$ milyar) Tahun 2006-2013



Sumber: www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140910_bisnis

Komoditi utama ekspor Iran ke Tiongkok:

- Minyak dan gas

Komoditi utama impor Iran dari Tiongkok:

- Tekstil
- Mesin peralatan
- Bahan industri kimia

Investasi langsung ke luar dari Tiongkok mencapai US \$ 108 milyar pada tahun 2013.¹¹²

Secara politik, Iran menganggap Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan besar yang dapat menandingi AS, sehingga Republik Rakyat Tiongkok merupakan sekutu potensial bagi Iran dimana Iran memanfaatkan hal tersebut untuk membantunya melawan hegemoni AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu,

¹¹² www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140910_bisnis

Iran mengharapkan Republik Rakyat Tiongkok mampu melindungi kebijakan nuklirnya dari peningkatan sanksi yang diajukan AS dan sekutunya.

Faktor lain yang melatarbelakangi Iran tetap menjalin hubungan baiknya dengan Republik Rakyat Tiongkok, karena kepentingan militer. Bagi Iran, Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu sekutu terkuat Iran di Dewan Keamanan PBB, yang menjadi pemasok utama teknologi dan bantuan lainnya untuk Iran. Republik Rakyat Tiongkok memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya militerisasi Iran, termasuk penawaran dari senjata, teknologi nuklir dan barang modal. Republik Rakyat Tiongkok mendukung Iran dengan teknologi militer canggih, termasuk akses rudal balistik dengan kemampuan tinggi.¹¹³

Bila ditilik jauh ke belakang, Republik Rakyat Tiongkok dan Iran juga memiliki kesamaan sebagai pewaris kebudayaan besar di dunia yang sedikit banyak mempengaruhi cara pandang pemimpin kedua negara untuk saling menaruh hormat. Namun, faktor terpenting dari alasan keduanya untuk saling mengikatkan diri adalah faktor geo-politis. Kedua negara yang lahir dari revolusi perjuangan pembebasan dari kekuatan asing, kini justru menghadapi ancaman dominasi asing, dalam hal ini AS dan sekutu-sekutu Baratnya.

Baik Republik Rakyat Tiongkok maupun Iran, yang lahir dari semangat anti dominasi asing, secara otomatis harus berhadapan dengan semangat ekspansionisme AS. Maka, dalam situasi seperti ini tidak bisa disalahkan jika kedua negara berusaha memperkuat hubungan untuk bersama-sama menghadapi

¹¹³ <http://eprints.upnyk.ac.id/2729/>

musuh yang sama. Seperti kata-kata bijak Tiongkok kuno yang menyatakan bahwa “tujuan yang sama memecah belah, musuh yang sama menyatukan”.¹¹⁴

Dari uraian di atas terlihat alasan Tiongkok tidak mendukung pemberian sanksi terhadap Iran adalah karena Tiongkok harus mempertimbangkan kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi militer dan konteks internasional. Dengan tidak mendukung sanksi kepada Iran, maka pertumbuhan ekonomi kedua negara akan meningkat, begitu juga di bidang lainnya seperti kerjasama industri, perdagangan dan lain-lain.

¹¹⁴ <http://liputanislam.com/berita/bagaimana-as-menyatukan-iran-dan-cina/>